
KEBIJAKAN BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA DALAM PENGENDALIAN LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK DI KABUPATEN NABIRE

Oleh:

Koernelis Angwarmas

Email:

tamrianerens@gmail.com

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Satya Wiyata Mandala

ABSTRACT

Controlling population growth rate is an attempt to suppress the human birth rate in order to create a society that is in harmony with the natural capacity. Especially for the Nabire Regency, Nabire population growth each year has increased, with an average growth rate of 1.1%. To suppress the population growth rate, Indonesia enacting Law No. 52 Year 2009 on Population Development and Family Development. Presence of Women Empowerment and Family Planning at national and local levels are expected to control the population growth rate both nationally and locally.

This study aims to determine how the policy Women Empowerment and Family Planning Nabire in controlling the rate of population growth in the Nabire Regency. The method used is a qualitative research method with data collection techniques used is the study of documentation, interviews and observation.

The results of this study indicate that the policy of Women Empowerment and Family Planning Nabire in controlling the population growth rate is the implementation of the Family Planning (KB). Policy supporting factors, among others: the regulatory system, local regulations and rules mayor of Nabire, the Regional Government commitment to family planning and the Empowerment of Women designated by maketh revitalize family planning programs become part of the Development Plan; Commitment partners who are good enough to support the policy of Family Planning and Women's Empowerment; Community participation in planning programs and the Empowerment of Women in Nabire Regency; and competence of employees adequate apparatus. The efforts undertaken include: Mobilizing and empowering the whole community in the program and the Empowerment of Women; Operasion strengthen human resources; Improving the survival and well-being of the family; Ensure the availability of contraceptives and service program for all participants; Improved access to information and reproductive health services; Granting Extension and IEC to members of the PKK, public and Religion through the container meetings PKK village in Posyandu, as well as a group meeting activities to raise family welfare (Generating), group activities of family resilience (BKB, BKR and BKL) by the extension staff planning in the field of the importance for families to the preservation of family planning; Conducting communication and interpersonal counseling (KIP-Counseling) to the EFA are not family planning through home visits by KB officers (PKB).

Keywords: *Population Growth Rate, Women's Empowerment, Family Planning*

PENDAHULUAN

Pertumbuhan penduduk dipahami sebagai perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah pada waktu tertentu dibandingkan waktu sebelumnya. Pengertian lainnya adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu setiap tahunnya. Pengendalian laju pertumbuhan penduduk adalah sebuah upaya untuk menekan angka kelahiran manusia guna menciptakan masyarakat yang selaras dengan daya tampung alam. Di Indonesia, pertumbuhan penduduk menjadi sebuah fenomena yang tak terhindarkan. Jumlah jiwa Indonesia mencapai peringkat 4 dunia setelah Cina, India dan Amerika Serikat. Semakin banyaknya jumlah penduduk akan mempengaruhi sektor kehidupan yang lain. Dalam hal kehidupan sosial, kriminalisasi dan marginalisasi penduduk bisa menjadi salah satu dampak dari tingginya jumlah penduduk. Dalam hal sanitasi, dengan adanya jumlah penduduk yang banyak akan mempengaruhi kebersihan lingkungan karena semakin tinggi produksi sampah yang akan dihasilkan dari jumlah penduduk yang banyak.

Untuk mengimbangi dan menekan laju pertumbuhan penduduk, maka Indonesia memberlakukan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Selain itu, hadirnya Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana di tingkat Nasional maupun lokal diharapkan dapat mengendalikan laju pertumbuhan penduduk secara nasional maupun lokal.

Kebijakan yang diambil pemerintah Indonesia dalam upaya mengatasi masalah jumlah penduduk, yaitu Menganangkan program Keluarga Berencana (KB) sebagai gerakan nasional. Keluarga Berencana (KB) adalah suatu program yang dicanangkan pemerintah dalam upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan (PUP), pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera.

Khusus untuk Kabupaten Nabire, pertumbuhan penduduk Kabupaten Nabire setiap tahun mengalami peningkatan, dengan rata-rata laju pertumbuhan sebesar 1,1% (BPS 2023). Kabupaten Nabire sebagai salah satu dari Pusat Kegiatan Nasional di Provinsi Papua Tengah, merupakan kota yang sedang berkembang dengan dinamika pembangunan yang dinamis, terus berpacu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kunci peningkatan dan pencapaiannya terletak dari sistem perencanaan yang handal. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menemukan beberapa fakta dan permasalahan yang terjadi di Kabupaten Nabire dalam hubungannya dengan pertumbuhan penduduk, diantaranya adalah:

- 1) Bertambahnya penduduk berarti meningkat pula tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Nabire, sementara itu luasan lahan permukiman semakin menyempit sebagai konsekuensi meningkatnya jumlah penduduk;
- 2) Bertambahnya penduduk juga menyebabkan produksi sampah dan air limbah meningkat, apalagi bila sarana dan prasarana sanitasi belum memadai yang akan berdampak buruk terhadap kesehatan lingkungan seperti meningkatnya angka kesakitan dan bahkan angka kematian bayi;
- 3) Kurangnya aparat sipil negara di bidang KB sehingga pelaksanaan program kebijakan di bidang pertumbuhan penduduk melalui KB kurang berjalan dengan maksimal;
- 4) Kurangnya pemahaman masyarakat tentang program KB untuk menekan laju pertumbuhan penduduk karena masih rendahnya sumber daya manusia;
- 5) Dukungan infrastruktur, sarana pendukung berupa transportasi dan lainnya belum menunjang pelaksanaan program;
- 6) Partisipasi masyarakat di dalam pelaksanaan program KB kurang berjalan karena faktor pemahaman yang keliru mengenai program KB.

Persoalan tersebut merupakan beberapa tantangan yang hendak dijawab oleh badan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana, Kabupaten Nabire. Oleh karena itu untuk mengatur jumlah kelahiran, wanita diprioritaskan untuk menggunakan alat/metode KB.

Adapun upaya yang dilakukan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Nabire untuk pencapaian target dimaksud adalah dengan menekankan:

- 1) Pemberian Penyuluhan dan KIE kepada anggota PKK, Tokoh Masyarakat dan Agama melalui wadah pertemuan PKK Lingkungan/Kelurahan di Posyandu, serta pertemuan kelompok kegiatan peningkatan kesejahteraan keluarga (UPPKS), kelompok kegiatan ketahanan keluarga (BKB, BKR dan BKL) oleh petugas penyuluh KB di lapangan tentang pentingnya bagi keluarga untuk kelestarian ber KB.
- 2) Melakukan kegiatan komunikasi inter personal konseling (KIP-Konseling) kepada PUS yang tidak ber KB melalui kunjungan rumah oleh petugas KB (PKB) bersama kader KB (PPKBD dan Sub PPKBD).
- 3) Melakukan pelayanan kontrasepsi ulangan kepada PUS yang ber KB agar tidak putus pakai alat kontrasepsi di Puskesmas, Mobil Pelayanan KB di Kelurahan-kelurahan, Kantor BKB-PP dan Pos alat KB Desa (PAKBD) pada kader KB. Melakukan pelayanan KB Baru bagi Keluarga Baru (menunda kehamilan) dan bagi PUS yang baru melahirkan (Penjarangan Kelahiran). Melakukan pelayanan KB bagi PUS yang tidak pakai KB (tidak ingin anak lagi).
- 4) Droning ketersediaan alat kontrasepsi ke Klinik KB di Pustu, Puskesmas, Klinik KBSwasta dan PAKBD.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul: “Kebijakan Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Dalam Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk Di Kabupaten Nabire .”

Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah: Bagaimanakah kebijakan Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana dalam pengendalian laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Nabire ? sedangkan tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui bagaimanakah kebijakan Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Nabire dalam pengendalian laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Nabire.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi deskriptif-literer. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui kebijakan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dalam pengendalian laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Nabire .

Konsep Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberdayaan (*empowerment*), berasal dari kata *power* yang artinya keberdayaan atau kekuasaan. Pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana seseorang, rakyat, organisasi dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai (berkuasa atas) kehidupannya (Suharto, 2003:35). Sedangkan kata Perempuan menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, adalah “jenis sebagai lawan laki-laki; wanita.” Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata perempuan bermakna (1) orang (manusia) yang hamil, melahirkan anak, dan menyusui; wanita; (2) istri; bini; - nya sedang hamil; (3) betina (khusus untuk hewan), sedangkan kata wanita bermakna perempuan dewasa: kaum, kaum putri (dewasa). Jadi pemberdayaan perempuan adalah usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial. Posisi perempuan akan membaik hanya ketika perempuan dapat mandiri dan mampu menguasai atas keputusan-keputusan yang berkaitan dengan kehidupannya.

Menurut Novian (2010) pemberdayaan perempuan adalah upaya pemampuan perempuan untuk memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya, ekonomi, politik, sosial, budaya,

agar perempuan dapat mengatur diri dan meningkatkan rasa percaya diri untuk mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah, sehingga mampu membangun kemampuan dan konsep diri. Pemberdayaan perempuan merupakan sebuah proses sekaligus tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah kegiatan memperkuat kekuasaan dan keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan merujuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh perubahan sosial, yaitu masyarakat menjadi berdaya.

Keluarga berencana (disingkat KB) adalah gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran. Keluarga berencana adalah suatu usaha untuk menjarangkan atau merencanakan jumlah dan jarak kehamilan dengan memakai kontrasepsi (Manuaba, 2003). Keluarga berencana menurut WHO adalah tindakan yang memakai individu atau pasangan suami istri untuk:

- o Mendapatkan obyek-obyek tertentu
- o Menghindari kelahiran yang tidak diinginkan
- o Mendapatkan kelahiran yang memang diinginkan
- o Mengatur interval diantara kehamilan
- o Mengontrol waktu saat kelahiran dalam hubungan dengan umur suami istri
- o Menentukan jumlah anak dalam keluarga (Hanafi, 2004)

Pertumbuhan Penduduk dan Teori Laju Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk dipahami sebagai perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah pada waktu tertentu dibandingkan waktu sebelumnya. Perubahan jumlah penduduk disebabkan oleh banyak faktor diantaranya, jumlah kelahiran, kematian dan perpindahan penduduk (migrasi).

Indikator tingkat pertumbuhan penduduk sangat berguna untuk memprediksi jumlah penduduk di suatu wilayah atau negara dimasa yang akan datang. Dengan diketahuinya jumlah penduduk yang akan datang, diketahui pula kebutuhan dasar penduduk ini, tidak hanya di bidang sosial dan ekonomi tetapi juga di bidang politik misalnya mengenai jumlah pemilih untuk pemilu yang akan datang. Tetapi prediksi jumlah penduduk dengan cara seperti ini belum dapat menunjukkan karakteristik penduduk dimasa yang akan datang. Untuk itu diperlukan proyeksi penduduk menurut umur dan jenis kelamin yang membutuhkan data yang lebih rinci yakni mengenai tren fertilitas, mortalitas dan migrasi.

a. Teori Thomas Robert Malthus

Pada tahun 1798 ia menerbitkan buku analisis kependudukan berjudul “Essay On The Principle of Population” dan mempertahankan pendapatnya bahwa “natural law” atau hukum alamiah yang mempengaruhi atau menentukan pertumbuhan penduduk. Dalil yang dikemukakan Malthus yaitu *bahwa jumlah penduduk cenderung untuk meningkat secara geometris (deret ukur), sedangkan kebutuhan hidup riil dapat meningkat secara arismetik (deret hitung)*. Menurut pendapat Malthus ada faktor-faktor pencegah yang dapat mengurangi kegoncangan dan kepincangan terhadap perbandingan antara penduduk dan manusia yaitu dengan jalan Preventive checks dan Positive checks. *Preventive checks*: faktor-faktor yang dapat menghambat jumlah kelahiran yang lazimnya dinamakan moral restraint. Termasuk didalamnya antara lain:Penundaan masa perkawinan; Mengendalikan hawa nafsu; dan Pantangan kawin. *Positive checks*: faktor-faktor yang menyebabkan bertambahnya kematian, termasuk di dalamnya antara lain:Bencana Alam; Wabah penyakit; Kejahatan; dan Peperangan.

b. Teori Adam Smith

Menurut Adam Smith Inti dari proses pertumbuhan ekonomi dibagi menjadi dua aspek utama yaitu pertumbuhan output total dan pertumbuhan penduduk. Mengenai peranan penduduk dalam pembangunan ekonomi, Smith berpendapat bahwa perkembangan penduduk akan mendorong pembangunan ekonomi. Penduduk yang bertambah akan memperluas pasar, maka akan meningkatkan spesialisasi dalam perekonomian tersebut. Perkembangan spesialisasi dan pembagian kerja akan mempercepat proses pembangunan ekonomi karena adanya spesialisasi akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan mendorong perkembangan teknologi (Sadono Sukirno, 2010).

c. Teori Transisi Demografi

Teori ini dikemukakan oleh para ahli demografi berkebangsaan Amerika Warren Thompson pada tahun 1929 yang sekarang dikenal dengan nama “theory of the demografic transition” atau teori transisi demografi. Teori ini menggambarkan empat proporsi yang saling berhubungan yang dinyatakan menurut tahap-tahap sesuai dengan pertumbuhan dan berubahnya keadaan penduduk.

Tahap 1: Jika Angka kematian tinggi sebanding dengan angka kelahiran, menghasilkan angka pertumbuhan nol (zero). Tahap 2: Jika Angka kematian menurun tidak disertai dengan penurunan angka kelahiran, maka akan menghasilkan angka pertumbuhan yang positif dan meningkat terus. Tahap 3: Jika Angka kematian terus menerus dan disertai dengan menurunnya angka kelahiran, maka akan menghasilkan pertumbuhan yang positif akan tetapi menurun. Tahap 4: Jika Angka kematian dan angka kelahiran juga rendah, maka hasilnya adalah pertumbuhan yang semakin berkurang yang pada akhir akan mencapai nol (zero).

Kebijakan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dalam pengendalian laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Nabire

Secara Nasional, kebijakan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana antara lain adalah:

1. Menganangkan program Keluarga Berencana (KB) sebagai gerakan nasional, dengan cara memperkenalkan tujuan-tujuan program KB melalui jalur pendidikan, mengenalkan alat-alat kontrasepsi kepada pasangan usia subur, dan menepis anggapan yang salah tentang anak. Meski program ini cenderung bersifat persuasif ketimbang dipaksakan. Program ini dinilai berhasil menekan tingkat pertumbuhan penduduk Indonesia;
2. Menetapkan Undang-Undang Perkawinan yang di dalamnya mengatur serta menetapkan tentang batas usia nikah; dan
3. Membatasi pemberian tunjangan anak bagi PNS/ABRI hanya sampai anak kedua.

Sedangkan kebijakan yang dilakukan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Nabire untuk pengendalian laju pertumbuhan penduduk adalah dengan menekankan:

- 1) Pemberian Penyuluhan dan KIE kepada anggota PKK, Tokoh Masyarakat dan Agama melalui wadah pertemuan PKK Lingkungan/Kelurahan di Posyandu, serta pertemuan kelompok kegiatan peningkatan kesejahteraan keluarga (UPPKS), kelompok kegiatan ketahanan keluarga (BKB, BKR dan BKL) oleh petugas penyuluh KB di lapangan tentang pentingnya bagi keluarga untuk kelestarian ber KB.

- 2) Melakukan kegiatan komunikasi inter personal konseling (KIP-Konseling) kepada PUS yang tidak ber KB melalui kunjungan rumah oleh petugas KB (PKB) bersama kader KB (PPKBD dan Sub PPKBD).
- 3) Melakukan pelayanan kontrasepsi ulangan kepada PUS yang ber KB agar tidak putus pakai alat kontrasepsi di Puskesmas, Mobil Pelayanan KB di Kelurahan/kelurahan, Kantor BKB-PP dan Pos alat KB Desa (PAKBD) pada kader KB. Melakukan pelayanan KB Baru bagi Keluarga Baru (menunda kehamilan) dan bagi PUS yang baru melahirkan (Penjarangan Kelahiran). Melakukan pelayanan KB bagi PUS yang tidak pakai KB (tidak ingin anak lagi).
- 4) Droning ketersediaan alat kontrasepsi ke Klinik KB di Pustu, Puskesmas, Klinik KB Swasta dan PAKBD.

Kebijakan Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana dalam pengendalian laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Nabire, sesuai dengan data yang diperoleh, diketahui bahwa kebijakan yang diambil adalah dengan penerapan program Keluarga Berencana (KB). Secara nasional, Kebijakan yang diambil pemerintah Indonesia dalam upaya mengatasi masalah jumlah penduduk, yaitu Menganakan program Keluarga Berencana (KB) sebagai gerakan nasional melalui pendewasaan usia perkawinan (PUP), pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera. Pencanangan program KB secara nasional dilakukan dengan cara memperkenalkan tujuan-tujuan program KB melalui jalur pendidikan, mengenalkan alat-alat kontrasepsi kepada pasangan usia subur, dan menepis anggapan yang salah tentang anak.

Di Kabupaten Nabire, kebijakan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dalam pengendalian laju pertumbuhan penduduk dilakukan melalui program keluarga berencana. Dalam RPJMD Kabupaten Nabire, salah satu unsur penting yang ditekankan di sana adalah kebijakan untuk Membangun Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera dengan sarannya adalah Program dan kegiatan Keluarga Berencana, Perlindungan Anak dan Remaja, *Gender mainstreaming* dilanjutkan dan ditingkatkan. Kebijakan ini dilakukan dengan cara:

1. Menjamin ketersediaan kontrasepsi dan pelayanan program bagi seluruh peserta KB, khususnya dalam pemberian kontrasepsi gratis bagi keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera 1 atau keluarga miskin lainnya serta peningkatan kesertaan KB pria;
2. Peningkatan akses informasi dan kualitas pelayanan kesehatan reproduksi dalam merencanakan kehamilan serta meningkatkan status kesehatan perempuan dan anak untuk mewujudkan keluarga sehat dengan anak ideal;
3. Pembinaan KIE program KB dan meningkatkan pengetahuan dalam kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Nabire ;
4. Peningkatan kemampuan keluarga dalam pengasuhan perkembangan anak, pembinaan kesehatan ibu, bagi anak dan remaja serta pembinaan lingkungan keluarga secara terpadu melalui posyandu kelompok kegiatan bina keluarga;
5. Pengoptimalan upaya-upaya advokasi, promosi dan KIE keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan untuk meneguhkan program kegiatan kepada masyarakat; dan
6. Pemberian kualitas dan kuantitas SDM di lini lapangan dan kualitas manajemen pengelolaan program KB dan Pemberdayaan Perempuan.

Faktor penunjang dan Penghambat kebijakan Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana dalam pengendalian laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Nabire

Faktor penunjang kebijakan dalam pengendalian laju pertumbuhan penduduk yang dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana KABUPATEN NABIRE antara lain adalah:

- Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, dan Keputusan RI Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara RI serta Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2008 tentang organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Teknis daerah Kabupaten Nabire ;
- Komitmen pemerintah yang semakin tinggi terhadap program KB dan Pemberdayaan Perempuan yang ditunjuk dengan dijadikannya revitalisasi program KB menjadi bagian dalam RPJM Kabupaten;
- Peraturan Bupati tentang rincian tugas dan fungsi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan memperjelas pembagian kewenangan dalam mengelola program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
- Komitmen mitra kerja yang cukup baik dalam mendukung kebijakan program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.
- Peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan program KB dan Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Nabire ;
- Setiap aparat memiliki kompetensi sesuai bidangnya dalam rangka administrasi yang transparan dan akuntabel.

Adapun beberapa faktor penghambat yang mempengaruhi implementasi kebijakan Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana dalam pengendalian laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Nabire, antara lain adalah:

- Menurunnya jumlah tenaga lapangan KB (rata-rata seorang PLKB/PKB membina 3 atau 4 kelurahan)
- Semakin menurunnya jumlah dan kualitas SDM dan pelaksana karena pensiun, pindah dan penyesuaian pegawai baru dalam bidangnya
- Belum meratanya keterampilan tenaga pelayanan dalam berkomunikasi dengan klien, agar proses *informed choice* dapat berjalan dengan baik.
- Bertambahnya penduduk sementara itu luasan lahan permukiman semakin menyempit;
- Bertambahnya produksi sampah dan air limbah meningkat,
- sarana dan prasarana sanitasi belum memadai yang berdampak buruk terhadap kesehatan lingkungan seperti meningkatnya angka kesakitan dan bahkan angka kematian bayi;
- Kurangnya aparat sipil negara di bidang KB sehingga pelaksanaan program kebijakan di bidang pertumbuhan penduduk melalui KB kurang berjalan dengan maksimal;
- Kurangnya pemahaman masyarakat tentang program KB untuk menekan laju pertumbuhan penduduk karena masih rendahnya sumber daya manusia;
- Dukungan infrastruktur, sarana pendukung berupa transportasi dan lainnya belum menunjang pelaksanaan program;
- Partisipasi masyarakat di dalam pelaksanaan program KB kurang berjalan karena faktor pemahaman yang keliru mengenai program KB.

Upaya pengendalian laju pertumbuhan penduduk yang dilakukan Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Nabire

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pelaksanaan kebijakan pengendalian laju pertumbuhan penduduk dari Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Nabire adalah:

- Menggerakkan dan memberdayakan seluruh masyarakat dalam program KB dan Pemberdayaan Perempuan;
- Memperkuat SDM operasi program KB dan Pemberdayaan Perempuan;
- Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui pelayanan KB dan kegiatan Pemberdayaan Perempuan.
- Menjamin ketersediaan kontrasepsi dan pelayanan program bagi seluruh peserta KB, khususnya dalam pemberian kontrasepsi gratis bagi keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera 1 atau keluarga miskin lainnya serta peningkatan kesertaan KB pria;
- Peningkatan akses informasi dan kualitas pelayanan kesehatan reproduksi dalam merencanakan kehamilan serta meningkatkan status kesehatan perempuan dan anak untuk mewujudkan keluarga sehat dengan anak ideal;
- Pembinaan KIE program KB dan meningkatkan pengetahuan dalam kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Nabire;
- Peningkatan kemampuan keluarga dalam pengasuhan perkembangan anak, pembinaan kesehatan ibu, bagi anak dan remaja serta pembinaan lingkungan keluarga secara terpadu melalui posyandu kelompok kegiatan bina keluarga;
- Pengoptimalan upaya-upaya advokasi, promosi dan KIE keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan untuk meneguhkan program kegiatan kepada masyarakat; dan
- Pemberian kualitas dan kuantitas SDM di lini lapangan dan kualitas manajemen pengelolaan program KB dan Pemberdayaan Perempuan.
- Pemberian Penyuluhan dan KIE kepada anggota PKK, Tokoh Masyarakat dan Agama melalui wadah pertemuan PKK Lingkungan/Kelurahan di Posyandu, serta pertemuan kelompok kegiatan peningkatan kesejahteraan keluarga (UPPKS), kelompok kegiatan ketahanan keluarga (BKB, BKR dan BKL) oleh petugas penyuluh KB di lapangan tentang pentingnya bagi keluarga untuk kelestarian ber KB.
- Melakukan kegiatan komunikasi inter personal konseling (KIP-Konseling) kepada PUS yang tidak ber KB melalui kunjungan rumah oleh petugas KB (PKB) bersama kader KB (PPKBD dan Sub PPKBD).
- Melakukan pelayanan kontrasepsi ulangan kepada PUS yang ber KB agar tidak putus pakai alat kontrasepsi di Puskesmas, Mobil Pelayanan KB di Kelurahan/kelurahan, Kantor BKB-PP dan Pos alat KB Desa (PAKBD) pada kader KB. Melakukan pelayanan KB Baru bagi Keluarga Baru (menunda kehamilan) dan bagi PUS yang baru melahirkan (Penjarangan Kelahiran). Melakukan pelayanan KB bagi PUS yang tidak pakai KB (tidak ingin anak lagi).
- Droping ketersediaan alat kontrasepsi ke Klinik KB di Pustu, Puskesmas, Klinik KB Swasta dan PAKBD.

PENUTUP

Berdasarkan penjelasan di atas, maka ada beberapa hal yang dapat ditarik kesimpulan, antara lain:

1. Kebijakan Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana dalam pengendalian laju pertumbuhan penduduk di KABUPATEN NABIRE dengan penerapan program Keluarga Berencana (KB). Untuk menunjang kebijakan tersebut, maka ada beberapa faktor penunjang kebijakan antara lain: sistem perundang-undangan, peraturan daerah dan peraturan Bupati Kabupaten Nabire, Komitmen pemerintah Daerah terhadap program KB dan Pemberdayaan Perempuan yang ditunjuk dengan dijadikannya revitalisasi program KB menjadi bagian dalam RPJM Kabupaten; Komitmen mitra kerja yang cukup baik dalam mendukung kebijakan program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan; Peran

- serta masyarakat dalam menyelenggarakan program KB dan Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Nabire; dan kompetensi aparatur pegawai yang memadai.
2. Faktor penghambat kebijakan Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana dalam pengendalian laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Nabire adalah: Menurunnya jumlah tenaga lapangan KB (rata-rata seorang PLKB/PKB membina 3 atau 4 kelurahan); Semakin menurunnya jumlah dan kualitas SDM dan pelaksana karena pensiun, pindah dan penyesuaian pegawai baru dalam bidangnya; dan belum meratanya keterampilan tenaga pelayanan dalam berkomunikasi dengan klien, agar proses *informed choice* dapat berjalan dengan baik serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang program KB untuk menekan laju pertumbuhan penduduk karena masih rendahnya sumber daya manusia; dan Dukungan infrastruktur, sarana pendukung berupa transportasi dan lainnya belum menunjang pelaksanaan program;
 3. Upaya pengendalian laju pertumbuhan penduduk yang dilakukan Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Nabire adalah: Menggerakkan dan memberdayakan seluruh masyarakat dalam program KB dan Pemberdayaan Perempuan; Memperkuat SDM operasi program KB dan Pemberdayaan Perempuan; Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui pelayanan KB dan kegiatan Pemberdayaan Perempuan; Menjamin ketersediaan kontrasepsi dan pelayanan program bagi seluruh peserta KB, khususnya dalam pemberian kontrasepsi gratis bagi keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera 1 atau keluarga miskin lainnya serta peningkatan kesertaan KB pria; Peningkatan akses informasi dan kualitas pelayanan kesehatan reproduksi dalam merencanakan kehamilan serta meningkatkan status kesehatan perempuan dan anak untuk mewujudkan keluarga sehat dengan anak ideal; Pembinaan KIE program KB dan meningkatkan pengetahuan dalam kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Nabire; Peningkatan kemampuan keluarga dalam pengasuhan perkembangan anak, pembinaan kesehatan ibu, bagi anak dan remaja serta pembinaan lingkungan keluarga secara terpadu melalui posyandu kelompok kegiatan bina keluarga; Pengoptimalan upaya-upaya advokasi, promosi dan KIE keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan untuk meneguhkan program kegiatan kepada masyarakat; Pemberian kualitas dan kuantitas SDM di lini lapangan dan kualitas manajemen pengelolaan program KB dan Pemberdayaan Perempuan; Pemberian Penyuluhan dan KIE kepada anggota PKK, Tokoh Masyarakat dan Agama melalui wadah pertemuan PKK Lingkungan/Kelurahan di Posyandu, serta pertemuan kelompok kegiatan peningkatan kesejahteraan keluarga (UPPKS), kelompok kegiatan ketahanan keluarga (BKB, BKR dan BKL) oleh petugas penyuluh KB di lapangan tentang pentingnya bagi keluarga untuk kelestarian ber KB; Melakukan kegiatan komunikasi inter personal konseling (KIP-Konseling) kepada PUS yang tidak ber KB melalui kunjungan rumah oleh petugas KB (PKB) bersama kader KB (PPKBD dan Sub PPKBD); Melakukan pelayanan kontrasepsi ulangan kepada PUS yang ber KB agar tidak putus pakai alat kontrasepsi di Puskesmas, Mobil Pelayanan KB di Kelurahan/kelurahan, Kantor BKB-PP dan Pos alat KB Desa (PAKBD) pada kader KB. Melakukan pelayanan KB Baru bagi Keluarga Baru (menunda kehamilan) dan bagi PUS yang baru melahirkan (Penjarangan Kelahiran). Melakukan pelayanan KB bagi PUS yang tidak pakai KB (tidak ingin anak lagi); dan Droning ketersediaan alat kontrasepsi ke Klinik KB di Pustu, Puskesmas, Klinik KB Swasta dan PAKBD.

Ada beberapa saran yang dapat disampaikan antara lain:

1. Program KB adalah salah satu jalan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk yang dilakukan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Nabire. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan positif dari para pegawai di bidangnya

- untuk memberikan penyuluhan dan memberikan pemahaman akan pentingnya penggunaan KB bagi peningkatan kesejahteraan rakyat;
2. Diketahui bahwa adanya beberapa kendala yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan kurang berjalan dengan baik, oleh karena itu maka sangat diharapkan pemerintah Kabupaten Nabire agar memenuhi beberapa hambatan tersebut melalui kebijakan konkret seperti penambahan sarana dan prasarana, penambahan jumlah tenaga di lapangan dan peningkatan kesejahteraan pegawai agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan dengan baik;
 3. Untuk membantu pemerintah, sangat diharapkan peran masyarakat dalam menunjang kebijakan melalui para tokoh masyarakat, tokoh agama, para dokter dan perawat dan tenaga kependidikan untuk memberikan pemahaman yang baik bagi warga masyarakat demi terlaksanannya kebijakan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk demi kesejahteraan dan kebahagiaan rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Keempat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008).
- Anderson, James E. (1969). *Public Policy Making*. (New York: Holt, Rinehart and Winston, 2nd ed.).
- Hanafi, Hartanto. (2004). *Keluarga Berencana dan Kontrasepsi*. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan).
- Julianto Witjaksono (Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN).
- Manuaba, Ida Bagus Gde. (2003). *Penuntun Kepaniteraan Klinik Obstetri dan Ginekologi Edisi 2* (Jakarta: EGC).
- Novian, Budhy. (2010). *Sekilas Tentang Pemberdayaan Perempuan*. Artikel Sanggar Kegiatan Belajar Kota Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung.
- Rahardjo, H. Mudjia, (2010). *Tahapan Analisis Kebijakan Pendidikan*, dalam <http://ide2-pendidikan.blogspot.com/2009/06/3-tahapan-analisis-kebijakan-pendidikan.html> (Senin 01 Februari 2010).
- Sadono Sukirno, (2010). *Makroekonomi: Teori Pengantar*. (Jakarta: Rajawali Press)
- Suharto, Edi. (2003), *Pembangunan Kebijakan dan Kesejahteraan Sosial*, (Bandung: Mizan), cet. Ke-1.
- Undang-Undang tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Nomor 52 Tahun 2009 menggantikan UU No. 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan keluarga sejahtera.
- Winarno, Budi, (2012). *Kebijakan Publik, Teori, Proses dan Studi Kasus*. (Yogyakarta: CAPS).